

## MEWUJUDKAN DEMOKRASI PANCASILA: HARMONI ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN MENJUNJUNG MUSYAWARAH MUFAKAT

Happy Novita<sup>1</sup>, Kemal Adristya<sup>2</sup>, Maura Kholilatul<sup>3</sup>, Muhammad Al Rifqu<sup>4</sup>, Siti Karina<sup>5</sup>, Taun<sup>6</sup>  
Universitas Singaperbangsa Karawang

<u>Article Info</u>	<u>ABSTRAK</u>
<p><b>Article history:</b> Published Mei 31, 2024</p> <hr/> <p><b>Kata Kunci:</b> Demokrasi Pancasila, Musyawarah Mufakat, Harmonisasi Hak dan Kewajiban.</p>	<p>Demokrasi Pancasila merupakan model demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, dengan prinsip musyawarah mufakat sebagai pilar utamanya. Prinsip ini menekankan pencapaian konsensus melalui diskusi dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat. Namun, dalam praktiknya, terdapat tantangan seperti kurangnya pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila, dominasi kelompok tertentu, kurangnya partisipasi masyarakat, serta adanya kepentingan politik dan ekonomi yang mengabaikan prinsip musyawarah mufakat. Penelitian ini mengeksplorasi konsep demokrasi Pancasila dan prinsip musyawarah mufakat, mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya, serta mengusulkan upaya perbaikan seperti penguatan pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila, peningkatan kapasitas fasilitasi, penguatan mekanisme partisipasi masyarakat, dan penerapan prinsip good governance. Harmonisasi antara hak dan kewajiban dalam proses musyawarah mufakat menjadi kunci untuk mencapai keputusan yang adil, inklusif, dan dapat diterima semua pihak. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang upaya mewujudkan demokrasi Pancasila yang sejati melalui implementasi prinsip musyawarah mufakat secara konsisten dan penuh komitmen.</p>

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Salah satu sila yang menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah sila keempat, yaitu "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan". Sila ini mengandung makna bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk bermusyawarah dalam mengambil keputusan bagi kepentingan bersama (Murzanita, Melisa, 2018).

Musyawarah mufakat merupakan cara yang diajarkan dalam mewujudkan demokrasi Pancasila. Prinsip ini menekankan pentingnya mencapai keputusan melalui jalan diskusi dan konsensus, bukan dengan voting atau pemaksaan kehendak mayoritas. Dalam konteks ini, musyawarah mufakat menjadi jalan tengah antara demokrasi liberal yang individualistis dan otoritarian yang sentralistis. Prinsip ini mengutamakan pendekatan yang lebih humanis dan inklusif, di mana setiap individu memiliki hak untuk menyuarakan aspirasi dan pendapatnya, sementara pada saat yang sama, kewajiban untuk menghargai perbedaan pendapat dan mencari titik temu melalui dialog yang konstruktif juga harus dipenuhi (Handayani, Ria, 2015).

Esensi dari musyawarah mufakat adalah mengupayakan tercapainya kesepakatan bersama melalui diskusi yang terbuka, saling menghargai, dan dengan semangat untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Dalam proses ini, voting atau pemaksaan kehendak mayoritas dihindari karena dapat menimbulkan ketidakpuasan dan perpecahan di antara pihak-pihak yang terlibat. Sebaliknya, musyawarah mufakat menekankan pentingnya mendengarkan setiap pendapat, memahami sudut pandang yang berbeda, dan mencari solusi win-win yang mengakomodasi kepentingan bersama.. Dalam konteks demokrasi Pancasila, hak setiap individu untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi harus diimbangi dengan kewajiban untuk menghormati pendapat orang lain serta mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

Harmonisasi antara hak dan kewajiban dalam bermusyawarah menjadi kunci utama dalam mewujudkan demokrasi Pancasila yang sejati. Di satu sisi, setiap warga negara memiliki hak untuk menyuarakan aspirasinya tanpa rasa takut atau tekanan. Namun di sisi lain, kewajiban untuk menghargai perbedaan pendapat dan mencari titik temu melalui dialog yang konstruktif juga harus dipenuhi.

Dalam jurnal ini, kami akan mengeksplorasi konsep demokrasi Pancasila dan bagaimana prinsip musyawarah mufakat dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kami akan menganalisis harmoni antara hak dan kewajiban yang harus dijunjung dalam proses musyawarah, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan demokrasi Pancasila yang sebenarnya. Dengan memahami konsep ini secara mendalam, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih demokratis, inklusif, dan harmonis.

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam konsep demokrasi Pancasila, khususnya terkait dengan prinsip musyawarah mufakat dan harmonisasi antara hak dan kewajiban dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi perspektif dan pengalaman subjektif dari para partisipan terkait dengan topik yang diteliti.

Wawancara mendalam akan dilakukan dengan para ahli, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses musyawarah dan pengambilan keputusan di berbagai tingkatan, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang praktik musyawarah mufakat, tantangan yang dihadapi, serta bagaimana harmonisasi antara hak dan kewajiban diterapkan dalam proses tersebut.

Observasi partisipatif akan dilakukan dengan mengamati secara langsung proses musyawarah dan pengambilan keputusan dalam berbagai forum, seperti rapat desa, musyawarah perencanaan pembangunan daerah, dan sidang-sidang di lembaga perwakilan rakyat. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh data empiris tentang dinamika interaksi dan proses musyawarah yang terjadi di lapangan.

Studi dokumentasi akan dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen terkait, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, risalah rapat, dan laporan-laporan yang berkaitan dengan praktik musyawarah dan pengambilan keputusan di Indonesia. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi akan dianalisis secara tematik dengan menggunakan metode analisis tematik (thematic analysis). Proses analisis meliputi pengodean data, identifikasi tema-tema utama, dan interpretasi makna dari tema-tema tersebut dalam konteks konsep demokrasi Pancasila dan prinsip musyawarah mufakat.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan dan mengombinasikan data dari sumber-sumber yang berbeda (wawancara, observasi, dan dokumentasi). Selain itu, member checking juga akan dilakukan dengan memvalidasi temuan penelitian kepada partisipan untuk memastikan akurasi dan kebenaran interpretasi yang dilakukan oleh peneliti.

Metode penelitian kualitatif ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konsep demokrasi Pancasila, praktik musyawarah mufakat, dan harmonisasi antara hak dan kewajiban dalam proses pengambilan keputusan di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam upaya mewujudkan demokrasi Pancasila yang sebenarnya.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Konsep Demokrasi Pancasila dan Musyawarah Mufakat**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep demokrasi Pancasila dan prinsip musyawarah mufakat masih relevan dan penting untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Musyawarah mufakat merupakan jalan tengah antara demokrasi liberal yang individualistis dan otoritarian yang sentralistis. Prinsip ini menekankan pentingnya mencapai keputusan melalui diskusi dan konsensus, dengan menghargai perbedaan pendapat dan aspirasi setiap individu. Prinsip musyawarah mufakat menekankan pentingnya mencapai keputusan melalui diskusi dan konsensus, dengan menghargai perbedaan pendapat dan aspirasi setiap individu. Ini berarti bahwa dalam proses pengambilan keputusan, semua pihak yang terlibat harus diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya tanpa rasa takut atau tekanan. Perbedaan pendapat dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan justru memperkaya diskusi, bukan dilihat sebagai ancaman atau hambatan.

Dengan menghargai perbedaan pendapat dan aspirasi, proses musyawarah mufakat memungkinkan terjadinya pertukaran ide dan gagasan yang konstruktif. Setiap pihak dapat menyampaikan argumen dan alasan di balik pendapatnya, sementara pihak lain mendengarkan dengan sikap terbuka dan saling menghormati. Melalui dialog yang terbuka dan saling menghargai ini, diharapkan dapat dicapai suatu konsensus yang mengakomodasi kepentingan semua pihak, atau setidaknya ditemukan titik temu yang dapat diterima bersama.

Hal ini berbeda dengan mekanisme pengambilan keputusan melalui voting atau pemaksaan kehendak mayoritas, di mana pendapat minoritas seringkali diabaikan atau bahkan dimarjinalkan. Dalam proses musyawarah mufakat, setiap suara dan aspirasi dihargai, dan upaya dilakukan untuk mencari solusi yang dapat memuaskan semua pihak. Konsensus yang dicapai melalui musyawarah mufakat cenderung lebih kuat dan berkelanjutan karena didasarkan pada kesepakatan bersama, bukan pemaksaan kehendak sebagian pihak atas pihak lainnya (Yasin, Johan, 2015).

#### **2. Praktik Musyawarah Mufakat di Lapangan**

Berdasarkan observasi partisipatif, ditemukan bahwa praktik musyawarah mufakat masih dijalankan dalam berbagai forum pengambilan keputusan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Namun, terdapat beberapa tantangan dan kendala dalam pelaksanaannya, seperti dominasi kelompok tertentu, kurangnya partisipasi masyarakat, dan kurangnya komitmen untuk mencapai konsensus. Meskipun prinsip musyawarah mufakat telah diajarkan sejak dini, dalam praktiknya masih sering terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan. Beberapa pihak cenderung memaksakan kehendak dan kepentingan mereka sendiri, tanpa memberikan ruang yang cukup bagi aspirasi dan pendapat dari pihak lain. Selain itu, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses

pengambilan keputusan juga menjadi tantangan tersendiri. Masyarakat seringkali lebih memilih untuk menjadi penonton dan menerima keputusan yang telah dibuat, tanpa ikut terlibat secara aktif dalam proses musyawarah. Tantangan lain yang dihadapi adalah kurangnya komitmen untuk mencapai konsensus yang sejati, di mana masing-masing pihak bersedia untuk mengesampingkan kepentingan pribadi demi kepentingan bersama. Tidak jarang, proses musyawarah hanya menjadi formalitas belaka, dan keputusan akhir lebih ditentukan oleh kekuatan politik atau ekonomi yang dominan.

### 3. Harmonisasi Antara Hak dan Kewajiban

Temuan dari wawancara mendalam mengungkapkan bahwa harmonisasi antara hak dan kewajiban dalam proses musyawarah mufakat sangat penting untuk mewujudkan demokrasi Pancasila yang sejati. Namun, terdapat beberapa tantangan dan kendala dalam pelaksanaannya, seperti dominasi kelompok tertentu, kurangnya partisipasi masyarakat, dan kurangnya komitmen untuk mencapai konsensus. Meskipun prinsip musyawarah mufakat telah diajarkan sejak dini, dalam praktiknya masih sering terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan. Beberapa pihak cenderung memaksakan kehendak dan kepentingan mereka sendiri, tanpa memberikan ruang yang cukup bagi aspirasi dan pendapat dari pihak lain (Winarno, dkk, 2016). Selain itu, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi tantangan tersendiri. Masyarakat seringkali lebih memilih untuk menjadi penonton dan menerima keputusan yang telah dibuat, tanpa ikut terlibat secara aktif dalam proses musyawarah. Tantangan lain yang dihadapi adalah kurangnya komitmen untuk mencapai konsensus yang sejati, di mana masing-masing pihak bersedia untuk mengesampingkan kepentingan pribadi demi kepentingan bersama. Tidak jarang, proses musyawarah hanya menjadi formalitas belaka, dan keputusan akhir lebih ditentukan oleh kekuatan politik atau ekonomi yang dominan. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi ketidakseimbangan antara penegakan hak dan pemenuhan kewajiban.

### 4. Tantangan dan Upaya Perbaikan

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan utama dalam mewujudkan demokrasi Pancasila dan mengimplementasikan prinsip musyawarah mufakat, antara lain:

- a. Kurangnya pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila dan musyawarah mufakat di kalangan masyarakat menjadi tantangan utama dalam mewujudkan demokrasi Pancasila yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pendidikan yang efektif tentang makna dan pentingnya nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak memahami esensi dari Pancasila dan prinsip musyawarah mufakat, sehingga tidak dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Dominasi kelompok atau individu tertentu dalam proses pengambilan keputusan menjadi tantangan lain yang harus dihadapi. Dalam situasi seperti ini, kepentingan dan keinginan dari kelompok atau individu tertentu cenderung diutamakan tanpa mempertimbangkan aspirasi pihak lain. Hal ini bertentangan dengan prinsip musyawarah mufakat yang mengutamakan konsensus dan menghargai perbedaan pendapat.
- c. Kurangnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses musyawarah juga menjadi kendala dalam mewujudkan demokrasi Pancasila. Apabila masyarakat tidak terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, maka keputusan yang diambil seringkali tidak mencerminkan kehendak masyarakat secara luas. Situasi ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dan memicu konflik di kemudian hari.

- d. Adanya kepentingan politik dan ekonomi yang mengabaikan prinsip musyawarah mufakat juga merupakan tantangan besar. Dalam situasi ini, keputusan lebih didasarkan pada pertimbangan kekuasaan dan keuntungan semata, bukan untuk kepentingan bersama. Hal ini tentu saja bertentangan dengan semangat musyawarah mufakat yang mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau kelompok tertentu (Yovita, Fiona, 2020).

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan upaya perbaikan seperti penguatan pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila dan musyawarah mufakat kepada masyarakat secara berkelanjutan dan efektif. Peningkatan kapasitas dan keterampilan fasilitasi dalam proses musyawarah juga perlu dilakukan agar proses tersebut dapat berjalan dengan lebih baik dan mencapai konsensus yang diharapkan. Selain itu, penguatan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi penting untuk mengakomodasi aspirasi dan suara masyarakat secara lebih luas. Terakhir, penerapan prinsip good governance dan transparansi dalam proses musyawarah diperlukan untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan dengan adil, terbuka, dan bebas dari intervensi kepentingan tertentu.

Melalui hasil dan pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa mewujudkan demokrasi Pancasila dan mengimplementasikan prinsip musyawarah mufakat membutuhkan komitmen dan upaya yang berkelanjutan dari semua pihak, baik pemerintah, lembaga perwakilan rakyat, maupun masyarakat. Harmonisasi antara hak dan kewajiban dalam proses musyawarah harus dijunjung tinggi untuk mencapai keputusan yang adil, inklusif, dan dapat diterima oleh semua pihak.

#### **4. KESIMPULAN**

Demokrasi Pancasila merupakan model demokrasi yang sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Prinsip musyawarah mufakat, yang menekankan pada pencapaian konsensus melalui diskusi dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat, menjadi pilar utama dalam mewujudkan demokrasi Pancasila yang sesungguhnya. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat tantangan dan kendala yang harus dihadapi, seperti kurangnya pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila dan musyawarah mufakat, dominasi kelompok atau individu tertentu, kurangnya partisipasi masyarakat, serta adanya kepentingan politik dan ekonomi yang mengabaikan prinsip musyawarah mufakat.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan upaya perbaikan yang komprehensif dan berkelanjutan. Penguatan pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila dan musyawarah mufakat kepada masyarakat menjadi langkah awal yang sangat penting. Selain itu, peningkatan kapasitas dan keterampilan fasilitasi dalam proses musyawarah, penguatan mekanisme partisipasi masyarakat, serta penerapan prinsip good governance dan transparansi juga menjadi kunci untuk mewujudkan demokrasi Pancasila yang lebih baik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Handayani, Ria. 2015. Hak dan Kewajiban Warga Negara. Vol 3 No.5
- Murzanita, Melisa. 2018. Harmoni Kewajiban Dan Hak Negara Dan Warga Negara Dalam Demokrasi Yang Bersumbu Pada Kedaulatan Rakyat Dan Musyawarah Untuk Mufakat. Makalah. <http://melisamurzanita.blogspot.com/2018/03/harmoni-hak-dan-kewajiban-negara-dan.html>. (Diakses pada 27 Mei 2024)
- Winarno, dkk.2016. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendiknas Republik Indonesia.
- Yasin, Johan. 2015. Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia. Vol 2 No. 1

Yovita, Fiona. 2020. Bagaimana Harmoni Kewajiban Dan Hak Negara Dan Warga Negara Dalam Demokrasi Yang Bersumbu Pada Kedaulatan Rakyat Dan Musyawarah Untuk Mufakat?. <http://web.if.unila.ac.id/fionayovita2311/2020/03/29/pendidikan-kewarga-negaraan-pertemuan-5/> (Diakses pada 27 Mei 2024)